



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT



2025



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

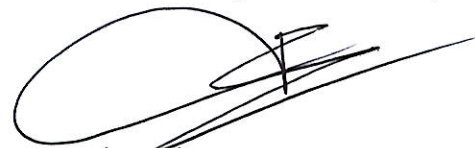
Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja, pengelolaan anggaran, serta tantangan yang dihadapi, dengan tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih. Selain itu, laporan dirancang secara terstruktur sehingga dapat terukur dan mudah dievaluasi.

Laporan ini menggambarkan hasil kerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2025, dengan informasi terukur mengenai capaian Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja 2025. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan strategi tugas dan fungsi di masa mendatang sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Apresiasi juga kami sampaikan atas kritik dan saran konstruktif yang mendukung peningkatan kualitas laporan kinerja di masa depan.

Jakarta, 19 Januari 2026

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat



Ahmad Avenzora

3.5.	62	
BAB IV PENUTUP		69
4.1	69	
4.2	70	
LAMPIRAN		73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kebutuhan, Jumlah Pegawai, dan Persentase Pegawai pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Jenis Jabatan, 2025.....	5
Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	29
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun, 2025.....	39
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas Tahun, 2025.....	40
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.....	44
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Terhadap Target Renstra.....	50
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Rincian Output Periode 2025.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sumber Daya Manusia pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Tingkat Pendidikan, 2025.....	7
Gambar 2. Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2029.....	19
Gambar 3. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2025.....	38
Gambar 4. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2024.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.....	75
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2025.....	77
Lampiran 3. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Golongan dan Kepangkatan Tahun 2025.....	78
Lampiran 4. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025.....	79
Lampiran 5. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025.....	80
Lampiran 6. Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025.....	81
Lampiran 7. Daftar Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.....	82
Lampiran 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat TA 2025.....	89



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyelenggaraan statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2029 adalah penyedia data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas untuk BPS yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas. Visi tersebut diwujudkan melalui tujuan yang tertuang dalam rencana strategis yaitu mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas dan *insight* yang relevan serta mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien pada kementerian/lembaga mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu terwujudnya penyediaan data dan *insight* statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, tersedianya data 5 sasaran visi Indonesia Emas (IE) dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) statistik kesejahteraan rakyat, serta terwujudnya pembinaan statistik sektoral kementerian/lembaga mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diturunkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan IKU Kedeputan Bidang Statistik Sosial serta sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik Tahun 2025-2029. Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik yaitu seluruh target pada Penetapan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah

menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 sebesar 108,27 persen. Berdasarkan nilai SAKIP dan capaian kinerja pada tahun 2025 total capaian PK Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar 189 persen dengan nilai kinerja organisasi rata-rata capaian PK sebesar 94,5. Nilai PKO Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 termasuk ke dalam kategori Baik yang berarti tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20.416.995.000 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Rincian Output yaitu Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Publikasi/Laporan Susenas. Dengan adanya efisiensi anggaran, berdasarkan laporan dari Biro Keuangan per 31 Desember 2025, pagu anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 sebesar Rp2.562.794.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.233.981.126,- atau 87,17 persen.

Efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 adalah sebesar 1,24 yang dapat diartikan efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Berbagai upaya efisiensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pembinaan statistik sektoral secara daring dan menghimbau pelaksana perjalanan dinas untuk memanfaatkan harga tiket NKRI dari maskapai Garuda Indonesia atau memilih alternatif maskapai lain untuk efisiensi perjalanan dinas.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Tujuan

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Potensi dan Permasalahan

Sistematika Penyajian Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 mengamanatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyampaikan bahwa laporan kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pelaporan kinerja bertujuan untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai sarana perbaikan kinerja instansi secara berkelanjutan.

Bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi oleh setiap instansi pemerintah dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahun. Hal ini memiliki landasan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 menyajikan target, sasaran, dan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat untuk periode tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Gambaran capaian secara kuantitatif, analisa, dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat disajikan dalam laporan kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja bertujuan melaporkan pencapaian target strategis secara

spesifik, terukur, dan tepat waktu guna memastikan akuntabilitas hasil kerja yang selaras dengan sasaran organisasi. Umpan balik juga disampaikan dalam laporan kinerja ini dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik [GU1.1] menyebutkan bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga;
2. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
3. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengakomodasi rencana strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025-2029.

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan

Kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diatur sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis

Beban Kerja (ABK) Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Administrasi (JA). Kebutuhan pegawai dan pemenuhannya pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, secara detil disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Kebutuhan, Jumlah Pegawai, dan Persentase Pegawai pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Jenis Jabatan, 2025

No	Jenis Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai		Persentase Pegawai	
			2024	2025	2024	2025
1	Direktur	1	1	1	100	100
2	Statistisi Ahli Utama	1	1	1	100	100
3	Statistisi Ahli Madya	14	11	14	79	100
4	Statistisi Ahli Muda	27	21	26 *)	78	96
6	Statistisi Ahli Pertama	25	14	13	56	52
7	Statistisi Mahir	1	1	1	100	100
8	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0	0	0
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0	0	0
10	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0
11	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	0	100
12	Arsiparis Terampil	1	0	1 *)	0	100
13	Pengolah Data	2	2	1	100	50
14	Sekretaris	1	1 **)	0	100	0
15	Arsiparis Mahir	-	0	1 ***)	-	-
16	Tugas belajar	-	2	0	-	-
17	CPNS	-	0	1	-	-
Jumlah		79	53 ****)	57 *****)	67	72

Keterangan :

*) Nama terdaftar di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, namun dibutuhkan/bertugas sehari-hari di unit kerja lain

***) Non-ASN

****) Nama terdaftar di unit kerja lain

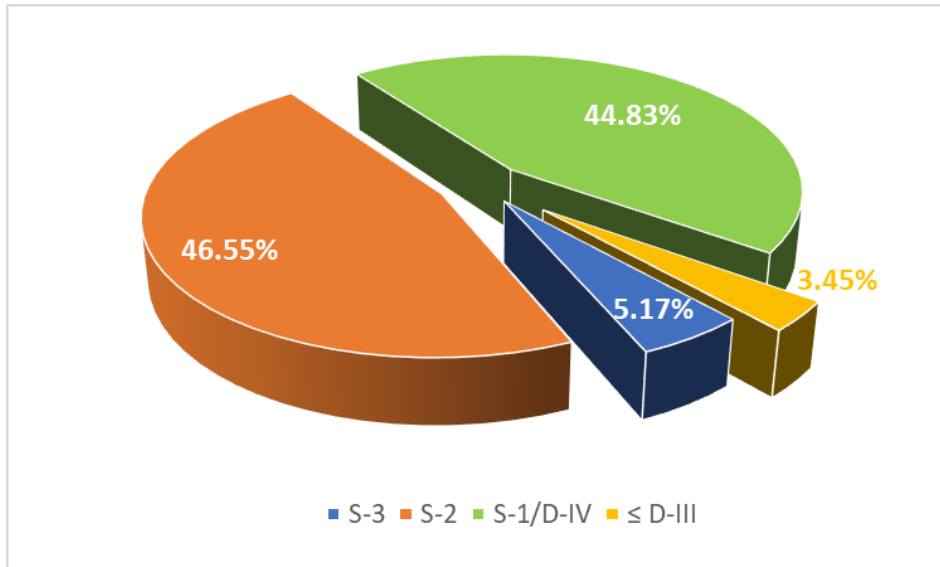
*****) Jumlah tanpa pegawai non-ASN

*****) Jumlah tanpa pegawai terdaftar/bertugas sehari-hari di unit kerja lain

Jenis jabatan di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik adalah sejumlah 14 jenis jabatan. Sejumlah 6 (enam) jenis jabatan yaitu Direktur, Statistisi Ahli Utama, Statistisi Ahli Madya, Statistisi Mahir, Arsiparis Ahli Pertama, dan Arsiparis Mahir telah terpenuhi 100 persen kebutuhannya. Selanjutnya, Statistisi Ahli Muda juga telah memenuhi 96 persen kebutuhan, namun demikian saat ini masih terdapat 1 (satu) orang pejabat Statistisi Ahli Muda yang dibutuhkan/bertugas sehari-harinya di unit kerja lain.

Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sehari-hari di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada akhir tahun 2025 yaitu sebanyak 58 orang. Diantara 58 orang pegawai tersebut terdapat 1 (satu) orang pegawai yang terdaftar di unit kerja lain dan 2 (dua) orang pegawai yang terdaftar di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat namun dalam kegiatan sehari-harinya mereka bertugas di unit kerja lain. Komposisi SDM di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut pendidikan adalah sebagai berikut: SDM berpendidikan S3 sebanyak 3 orang (5,17 persen), SDM berpendidikan S2 sebanyak 27 orang (46,55 persen), SDM berpendidikan S1/DIV sebanyak 26 orang (44,83 persen), dan berpendidikan D3 ke bawah sebanyak 2 orang (3,45 persen).

Komposisi SDM yang bertugas sehari-hari di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan di bidang statistika. Latar belakang pendidikan tersebut sudah sesuai dan sangat mendukung dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Komposisi SDM di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut tingkat pendidikan sesuai kondisi tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sumber Daya Manusia pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Tingkat Pendidikan, 2025

1.3.2. Pagu Anggaran Tahun 2025

Guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.713.679.000,- yang dituangkan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) rincian output sebagai berikut:

1. Pembinaan Statistik sektoral Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp317.548.000,
2. Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp619.600.000,-
3. Publikasi/Laporan Susenas sebesar Rp2.776.531.000,-

1.4 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

1. Data Susenas yang bersifat strategis untuk mengakomodasi indikator-indikator pembangunan yang dapat disandingkan, baik pada tataran regional, nasional maupun global.
2. Pada sisi internal, data dasar sosial ekonomi yang berasal dari Susenas 2023, 2024 dan 2025 dapat diolah menjadi berbagai publikasi, baik publikasi ARC maupun

non ARC untuk menggambarkan statistik rumah tangga; Statistik Sosial Budaya 2024; Profil Anak Usia Dini 2025; Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2025; Statistik Pemuda Indonesia 2025; Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025; Statistik Pendidikan 2025; Statistik Penunjang Pendidikan 2024; Publikasi Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2024; Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2024; Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2024; Publikasi Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025; Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025; Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2025; Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025; Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2025; Infografis Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025; Profil Statistik Kesehatan Indonesia; Indikator SDGs Kesejahteraan Rakyat 2025.

3. Pada sisi eksternal (pengguna data), data dasar sosial ekonomi yang berasal dari Susenas 2024 juga menjadi indikator pendukung dalam penghitungan berbagai indeks yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berbagai Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2024; Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 2024; Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 2024; Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2024; dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024.
4. Kerja sama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan UNICEF dalam kegiatan persiapan estimasi *Early Child Development Index* (ECDI) dengan metode *Small Area Estimation* (SAE) untuk menghasilkan *projection estimator*.
5. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga mengerjakan beberapa kegiatan *ad-hoc* selama tahun 2025, diantaranya adalah sebagai tim pendataan Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, tim Satgas Verifikasi Calon Siswa Sekolah Rakyat 2025, dan menjadi Sekretariat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Permasalahan yang berkaitan dengan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pemahaman akan pentingnya pembinaan statistik sangat bervariasi antar kementerian/lembaga, di sisi lain tiga dari tujuh K/L binaan merupakan kementerian baru yang masih awam terkait penyelenggaraan statistik sektoral di lembaganya masing-masing, sehingga pengadaan workshop terkait pembinaan statistik sektoral diharapkan dapat menjadi salah satu sarana penyampaian informasi terkait pembinaan serta Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
2. Banyaknya K/L binaan (7 K/L) serta terbatasnya anggota tim pembina statistik sektoral (1 koordinator dan 3 anggota) menjadi satu tantangan tersendiri untuk dapat menyamakan jadwal pembinaan dengan K/L yang memiliki banyak kegiatan serta anggota tim pembina yang juga terlibat menjadi anggota di tim lain.
3. Adanya efisiensi anggaran yang membuat pelatihan petugas Susenas Maret dan Seruti Triwulan I 2026 (pelaksanaannya di tahun 2025) diselenggarakan sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing, sehingga beberapa petugas mengikuti pelatihan secara *online* dan tidak semua petugas mendapatkan buku pedoman, padahal terdapat petugas baru yang baru pertama kali mencacah Susenas. Hal tersebut dapat berdampak pada pemahaman petugas tentang pertanyaan yang dicakup dalam Susenas.
4. Peningkatan jumlah sampel Susenas Maret 2026 berdampak pada meningkatnya jumlah instruktur utama (intama), jumlah kelas pelatihan instruktur nasional, sehingga membutuhkan SDM lebih. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan sebagai intama dan manajer kelas, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan permohonan intama dan manajer kelas dari direktorat lain.
5. Adanya perubahan jadwal rilis kemiskinan hasil Susenas Maret 2025 sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antar tim dan lintas direktorat untuk mendukung publikasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang

terdampak perubahan tersebut serta yang menggunakan sumber data selain Susenas.

6. Dibutuhkan penyederhanaan format publikasi di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada periode yang sama. Analisis atas capaian kinerja memungkinkan teridentifikasinya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2025 adalah sebagai berikut.

▪ Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

▪ Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025.

▪ Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025, Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terhadap Target Renstra 2025-2029, termasuk menguraikan secara sistematis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut. Disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 dalam mendukung capaian kinerja dan pelaksanaan tupoksi serta tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

- **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat serta strategi pemecahan masalah serta upaya tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

**Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat
Statistik Kesejahteraan Rakyat**

**Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik
Kesejahteraan Rakyat 2025-2029**

**Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan
Rakyat 2025**

**Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik
Kesejahteraan Rakyat 2025**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi BPS

Visi Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029, visi yang ditetapkan adalah *“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Visi tersebut mencerminkan komitmen strategis BPS untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.

Sebagai tindak lanjut dari visi tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja di Badan Pusat Statistik dituntut untuk berperan aktif dalam menyediakan data yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional.

Misi Badan Pusat Statistik

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPS Tahun 2025–2029, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Sinergi dari ketiga misi tersebut menegaskan komitmen BPS dalam menjembatani kebutuhan data nasional dengan proses perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, visi BPS sebagai lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif diharapkan dapat diwujudkan secara konsisten guna memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Perencanaan kinerja organisasi disusun berdasarkan empat elemen utama, yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Visi menggambarkan arah dan kondisi masa depan yang ingin dicapai organisasi dalam jangka menengah, umumnya sekitar lima tahun. Pernyataan visi harus mampu menunjukkan gambaran ideal organisasi pada akhir periode perencanaan.

Misi berfungsi menjelaskan mandat, peran utama, serta tanggung jawab organisasi dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Karena bersifat umum dan konseptual, misi belum dapat diukur secara kuantitatif. Tujuan merupakan hasil penurunan dari misi yang lebih terfokus, mencerminkan prioritas strategis organisasi, namun belum dirumuskan dalam indikator yang terukur secara jelas.

Selanjutnya, sasaran strategis atau sasaran program merupakan penjabaran tujuan dalam bentuk yang lebih operasional dan terukur, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi. Keempat unsur ini saling melengkapi dan membentuk kerangka perencanaan yang utuh, di mana visi menentukan arah jangka panjang, misi menjadi pedoman umum, tujuan memperjelas fokus strategi, dan sasaran program mengarahkan tindakan nyata yang dapat dinilai kinerjanya

2.2.1. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Sebagai unit kerja yang berada di bawah Kedeputian Bidang Statistik Sosial, perumusan Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat harus mengacu dan selaras

dengan Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diharapkan mampu berperan aktif dalam menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat yang akurat dan dapat dipercaya, serta menjalin kemitraan dengan Kementerian/Lembaga dalam penyediaan data yang mendukung proses perumusan kebijakan. Atas dasar tersebut, Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dirumuskan sebagai berikut: **“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**.

Dengan demikian, Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Periode 2025–2029 selaras dengan upaya penguatan peran strategis Kedeputan Bidang Statistik Sosial dan Badan Pusat Statistik dalam menjamin ketersediaan statistik yang berkualitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025–2029 juga menegaskan komitmen terhadap penguatan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas data sektoral.

2.2.2. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat secara optimal, diperlukan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menetapkan dua misi utama yang saling terintegrasi dan saling mendukung sebagai landasan strategis dalam menjalankan program dan kegiatan ke depan. Kedua misi tersebut dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil tetap selaras dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Misi ini berperan sebagai fondasi utama dalam upaya mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Ketersediaan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas menjadi elemen krusial untuk menjamin bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Melalui penyediaan analisis dan insight yang berbasis data yang kuat, direktorat ini berkontribusi dalam memastikan para pengambil keputusan memiliki dasar informasi yang andal dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan terarah. Selain mencerminkan nilai integritas dan profesionalisme, data yang dihasilkan juga menunjukkan komitmen terhadap penerapan metodologi ilmiah yang objektif dan terbebas dari pengaruh kepentingan tertentu.

2. Memperkuat Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari Kedeputusan Bidang Statistik Sosial, misi ini menegaskan urgensi penguatan koordinasi yang berkesinambungan antara seluruh produsen dan pengguna data statistik nasional. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berkontribusi dalam mendukung pengembangan Sistem Statistik Nasional melalui upaya penyelarasan metodologi, penguatan interoperabilitas dan keterpaduan data, serta penerapan standar dan prinsip statistik resmi. Melalui langkah-langkah tersebut, Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat diharapkan dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis data secara lebih efektif dan terarah.

Melalui integrasi dan keselarasan pelaksanaan kedua misi tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperkuat perannya dalam menghasilkan data

statistik kesejahteraan rakyat yang andal sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan demikian, visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai “Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” dapat diwujudkan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga mampu memberikan dampak positif yang optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gambar 2. Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2029

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2029

“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2029

- 1 Menyediakan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan *Insight* Untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
- 2 Memperkuat Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mendukung pencapaian visi serta pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merumuskan dua tujuan yang bersifat saling melengkapi dan terintegrasi. Perumusan tujuan ini diarahkan untuk memastikan terselenggaranya seluruh tugas dan fungsi Direktorat secara efektif,

efisien, dan berkelanjutan. Melalui pencapaian kedua tujuan strategis tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik kesejahteraan rakyat, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Dua tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Misi ke-1 : Menyediakan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Tujuan 1 : Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan *Insight* yang Relevan.

Tujuan ini berfungsi sebagai pijakan utama dalam upaya mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Melalui penyediaan statistik yang bermutu serta *insight* yang relevan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang statistik kesejahteraan rakyat. Ketersediaan data statistik yang berkualitas tidak hanya memperkuat dasar pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan kemampuan ke deputian dalam menjalankan perannya sebagai penyedia informasi yang independen, kredibel, dan dapat dipercaya.

Misi ke-2 : Memperkuat Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.

Tujuan 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Pencapaian tujuan ini memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berperan aktif dalam memperkuat sinergi antar instansi melalui penyelenggaraan statistik sektoral yang memenuhi standar, selaras secara metodologis, serta saling melengkapi. Kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan data, tetapi juga menjamin keterbandingan data sehingga dapat dimanfaatkan secara lintas sektor. Dengan sistem statistik yang berjalan secara efektif dan efisien, pemanfaatan data oleh berbagai pemangku kepentingan dapat dilakukan secara lebih optimal dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Melalui sinergi pelaksanaan kedua misi tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menjalankan perannya dalam penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas serta dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Implementasi misi ini menjadi landasan dalam mewujudkan visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai *“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”*, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menetapkan tiga sasaran strategis sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran strategis yang berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan akan diimplementasikan dalam periode 2025–2029. Adapun penjelasan mengenai sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas. Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini, yaitu Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas.
2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas (IE) dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Statistik Kesejahteraan Rakyat. Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini, yaitu Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas (IE) dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menjadi Statistik Resmi.
3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini, yaitu Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini, perumusan visi, misi, dan tujuan pada tingkat unit kerja/satuan kerja belum dapat ditetapkan secara final. Hal tersebut terkait dengan upaya penyesuaian dan penyelarasan terhadap arah kebijakan serta dokumen perencanaan strategis pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penetapan visi, misi, dan tujuan unit kerja/satuan kerja akan dilakukan setelah proses penyelarasan tersebut selesai, guna memastikan kesesuaian dan kesinambungan perencanaan di seluruh tingkatan organisasi.

2.3 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang statistik nasional, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025–2029 dengan mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029. Renstra tersebut disusun sebagai pedoman strategis yang memberikan arah, sasaran, serta tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik, sekaligus memastikan keselarasan dengan kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan dan target kinerja

yang tercantum dalam Renstra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.**

Sasaran ini menggambarkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penguatan perumusan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan yang berbasis data melalui penyediaan insight statistik yang berkualitas. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menetapkan **Indikator Kinerja: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.**

Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas merupakan perbandingan antara jumlah publikasi atau laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria kualitas dengan keseluruhan publikasi atau laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan. Publikasi dimaknai sebagai produk Badan Pusat Statistik yang menyajikan data hasil kegiatan statistik, baik dalam bentuk buku maupun non-buku. Sementara itu, laporan merupakan penyajian informasi secara tertulis yang bertujuan untuk memberikan gambaran, evaluasi, atau rekomendasi terkait pelaksanaan suatu kegiatan atau hasil penelitian dan pengembangan statistik. Dalam hal estimasi data tidak dapat disajikan hingga tingkat satuan kerja, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka *output* satuan kerja tersebut ditetapkan dalam bentuk laporan.

Publikasi yang berkualitas merupakan publikasi atau laporan yang memuat data yang bersumber dari Unit Kerja Eselon II di tingkat pusat serta memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data dan Indeks Aspek Pemanfaatan Data dengan kategori minimal Baik (nilai $\geq 2,6$). Sementara itu, laporan berkualitas adalah laporan yang menyajikan uraian mengenai pelaksanaan kegiatan, permasalahan atau kendala yang dihadapi, langkah penyelesaian yang dilakukan, serta rekomendasi yang dihasilkan.

Insight dan data statistik yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis bukti. Melalui penyediaan *insight* yang relevan dan andal, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berkontribusi terhadap:

- Peningkatan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.
- Optimalisasi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang transparan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini turut mendukung terwujudnya visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai “Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Dalam proses pencapaian sasaran kegiatan, terdapat berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi penyediaan *insight* dan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas. Oleh karena itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur sebagai berikut:

1. Risiko Keterbatasan Kualitas dan Relevansi Data Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - Dampak: Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan rakyat.
 - Mitigasi:
 - Memperkuat tahapan identifikasi kebutuhan data statistik kesejahteraan Rakyat.
 - Memperkuat metodologi pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat.
 - Memperkuat Kualitas Data Administratif untuk dapat digunakan sebagai sumber data kesejahteraan rakyat.

- Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dan petugas lapangan pada Survei di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menjaga standar kualitas.
2. Risiko Keterbatasan Pemahaman Pengguna Data Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Dampak: Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data kesejahteraan rakyat secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight.
 - Mitigasi:
 - Mengadakan program literasi statistik kesejahteraan rakyat secara rutin.
 - Meningkatkan aksesibilitas data statistik kesejahteraan rakyat melalui teknologi digital dan platform interaktif.
3. Risiko Ketidakpercayaan Pemangku Kepentingan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Dampak: Ketidakpercayaan terhadap data yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dapat timbul akibat persepsi bias atau independensi yang diragukan.
 - Mitigasi:
 - Meningkatkan transparansi dalam proses penyajian data statistik kesejahteraan rakyat.
 - Menjaga independensi lembaga dengan mematuhi prinsip-prinsip etika internasional yang berkaitan dengan data statistik kesejahteraan rakyat
- Dengan pengelolaan risiko yang efektif, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mendorong peningkatan berkelanjutan dalam pemanfaatan dan penyediaan insight data kesejahteraan rakyat. Upaya ini mendukung pencapaian sasaran kegiatan serta memperkuat peran Direktorat sebagai penyedia data yang andal dan kontributor kebijakan berbasis bukti, melalui pendekatan holistik yang mencakup peningkatan mutu data, penguatan literasi statistik, pemanfaatan teknologi, dan penerapan prinsip transparansi secara berkelanjutan dan akuntabel.

2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran kegiatan ini menegaskan komitmen Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan tersedianya indikator-indikator statistik kesejahteraan rakyat yang mendukung pencapaian sasaran visi, sekaligus memperkuat kebijakan berbasis data pada seluruh level pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indikator Kinerja: Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Menjadi Statistik Resmi.**

Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas serta 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berstatus sebagai statistik resmi merupakan indikator yang menggambarkan capaian penyediaan indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan yang menjadi mandat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini semakin menegaskan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari Badan Pusat Statistik yang independen, kredibel, dan berkontribusi aktif dalam penyediaan data strategis bagi pembangunan nasional.

Dalam proses pencapaian sasaran kegiatan ini, terdapat berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi penyediaan Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Kesejahteraan Rakyat. Oleh karena itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur sebagai berikut:

1. Risiko adanya revisi data untuk penyediaan 45 Indikator Utama Pembangunan.
 - Dampak: Kesalahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
 - Mitigasi:
 - Melakukan pemeriksaan tabulasi serta dilakukan konfirmasi kepada tim kompilasi dan pengolahan data.

- Melakukan revisi tabulasi indikator dan menyampaikan revisi kepada Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik selaku koordinator penyediaan Indikator Utama Pembangunan oleh BPS.

Dengan pengelolaan risiko yang terencana, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memastikan tersedianya Data Indikator Utama Pembangunan dan Sasaran Visi IE guna memperkuat kebijakan berbasis data yang berkualitas dan terpadu. Hal ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran kegiatan ini menunjukkan peran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing Kementerian/Lembaga, sebagai upaya untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data pada seluruh tingkat pemerintahan. Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan ini dilakukan melalui **Indikator Kinerja: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.**

Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Indikator ini disusun sebagai indikator komposit yang dibentuk dari dua variabel utama yaitu:

1. Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar.
2. Normalisasi kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektoral.

Pencapaian sasaran kegiatan ini memperkuat kedudukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari lembaga statistik nasional yang menjalankan fungsi pembinaan data di Indonesia, serta berperan aktif dalam

meningkatkan kualitas dan ketersediaan data strategis pembangunan pada setiap tingkatan sektor.

Dalam proses pencapaian sasaran kegiatan ini, terdapat berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Oleh karena itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur sebagai berikut:

1. Risiko Kurangnya Koordinasi Antar-Instansi Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - Dampak: Ketidakepahaman antar-instansi Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi Susenas.
 - Mitigasi:
 - Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
 - Mendorong penerapan pedoman standar statistik pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
 - Mendukung penguatan peran BPS sebagai koordinator utama dalam Susenas khususnya pada bidang statistik kesejahteraan rakyat.
2. Risiko Ketimpangan Kapasitas Statistik Antar Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - Dampak: Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dapat menghasilkan kualitas data statistik sektoral kesejahteraan rakyat yang tidak standar.
 - Mitigasi:
 - Menyelenggarakan pelatihan bagi SDM statistik antar Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Dengan mengantisipasi dan mengelola risiko secara terpadu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memastikan pembinaan statistik sektoral pada setiap K/L mitra berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas guna memperkuat kebijakan berbasis data yang efektif.

**Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025-2029**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan Insight yang Relevan.							
Sasaran 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas (IE) dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Statistik Kesejahteraan Rakyat.	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas (IE) dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menjadi Statistik Resmi.	Persen	-	53,33	53,33	73,33	100,00
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.							
Sasaran 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin (Skala 100)	76,33	68,68	75,04	80,38	86,34

2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

Untuk memperkuat komitmen pencapaian kinerja, pada awal tahun 2025 ditetapkan target kinerja setiap indikator, tujuan, dan sasaran strategis yang harus dicapai selama satu tahun, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2025. PK yang disetujui oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat ini merupakan *Performance Agreement* antara Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Deputi Bidang Statistik Sosial, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2025. Rincian PK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas dan Insight yang Relevan.			
Sasaran 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100,00
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.			
Sasaran 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin (Skala 100)	76,33

2.5 Dukungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, serta penanganan Isu Strategis

Nasional Tahun 2025 melalui penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, relevan, dan tepat waktu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan statistik yang menghasilkan indikator-indikator utama kesejahteraan rakyat sebagai dasar perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan aktif dalam mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, serta Isu Strategis Nasional Tahun 2025 melalui penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain itu, BPS juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang sosial, tepat sasaran.

Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional diwujudkan melalui beberapa inisiatif strategis sebagai berikut.

1. Penyediaan **Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan**. BPS mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Data yang dihasilkan secara akurat dan mutakhir menjadi rujukan utama bagi kementerian dan lembaga dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berperan dalam mendukung ketersediaan indikator-indikator kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan indikator tersebut dapat diturunkan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penggunaan indikator proksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berperan dalam pembinaan statistik sektoral berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui dukungan terhadap pengembangan Sistem Statistik Nasional pada lingkup

statistik kesejahteraan rakyat. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan memberikan pendampingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan statistik sektoral, guna meningkatkan kualitas data, keselarasan indikator, serta pemanfaatan data statistik dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Dukungan terhadap Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional

Dukungan BPS terhadap Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 diwujudkan melalui beberapa inisiatif sebagai berikut

1. Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebagai tindak lanjut atas salah satu prioritas utama Presiden dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, BPS mengelola DTSEN sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui integrasi berbagai sumber data pensasaran kemiskinan, BPS menghasilkan satu data tunggal yang digunakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial.

2. Dukungan terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem didukung melalui penyediaan data statistik, termasuk penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bersama unit kerja terkait di BPS pusat dan daerah berperan dalam menyediakan data dasar yang diperlukan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

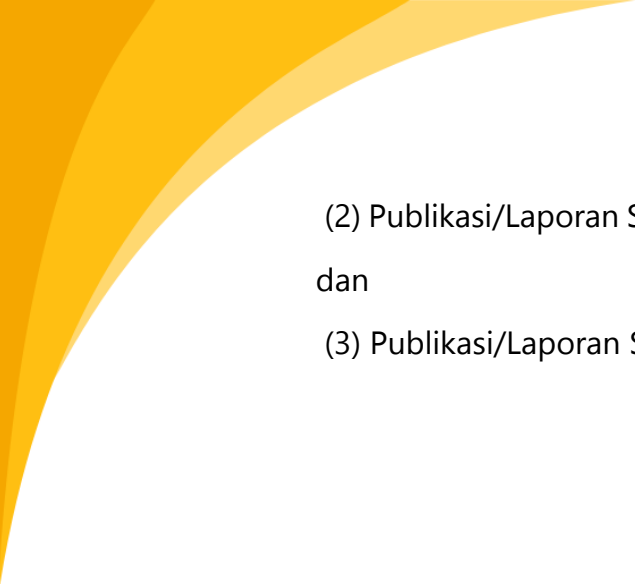
3. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. BPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan data statistik sosial ekonomi dan gizi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta dalam

mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kuesioner Susenas Maret dan September 2025, BPS mengumpulkan informasi terkait anggota rumah tangga penerima Program Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran anak sekolah. Selain itu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menjadi bagian dalam kegiatan *Adhoc* Survei Evaluasi dan Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, pada Survei Khusus dan Survei *Baseline*, di bawah komando Kedeputan Neraca dan Analisis Statistik.

2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

1. Rencana Kerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPS dan Prioritas Nasional melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu tersedianya publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas serta terlaksananya pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
2. Fokus rencana kerja diarahkan pada pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penyusunan dan penyajian laporan statistik kesejahteraan rakyat, serta penguatan koordinasi dan pembinaan statistik sektoral dengan kementerian/lembaga terkait.
3. Dari aspek penganggaran, untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperoleh alokasi anggaran total sebesar **Rp20.416.995.000** yang dialokasikan pada **Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik**. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam tiga rincian output, yaitu:
(1) Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat sebesar **Rp317.548.000**,

- 
- (2) Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar **Rp619.295.000**,
dan
- (3) Publikasi/Laporan Susenas sebesar **Rp18.374.998.000**.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

**Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025**

**Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan
Rakyat Terhadap Target Renstra**

**Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden,
dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.**

**Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025**

Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

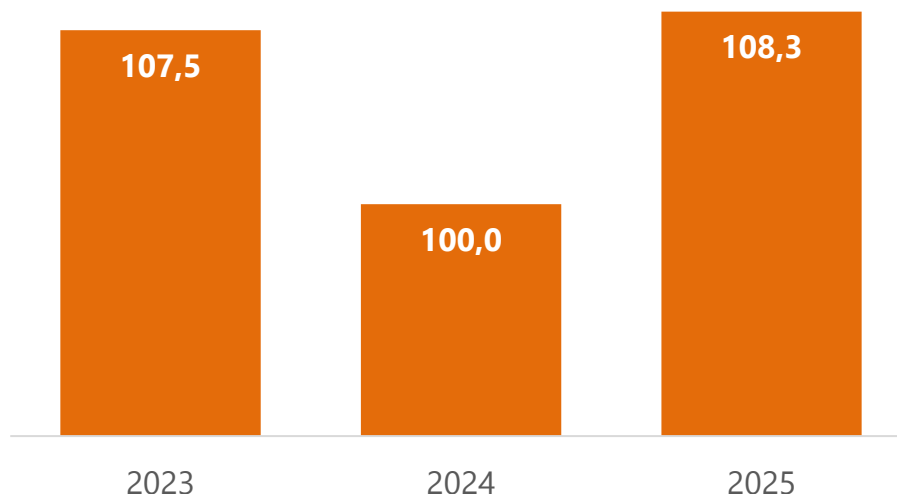
Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai monitoring atas pencapaian kinerja serta membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian kinerja pada setiap indikator kinerja. Bagian ini akan menjelaskan analisis kinerja yang meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi atas permasalahan yang dihadapi serta upaya perbaikan untuk peningkatan dan perbaikan capaian kinerja di masa mendatang.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis selama tahun 2025. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja maupun lembaga.

Perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2023-2025 menunjukkan fluktuasi. Meskipun demikian setiap tahun Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selalu berhasil meraih capaian kinerja 100 persen atau lebih (Gambar 3.1). Hal tersebut menunjukkan bahwa

realisasi kinerja yang dicapai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Gambar 3. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023-2025

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memiliki dua tujuan dan dua sasaran strategis. Capaian kinerja dari tujuan yang pertama yaitu "Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan" dengan sasaran strategis "Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas", diukur melalui indikator kinerja "Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas". Sedangkan capaian kinerja tujuan yang kedua yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien" dengan sasaran strategis "Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat" diukur melalui indikator kinerja "Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat". Seluruh indikator tersebut telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik. Pada tahun 2023-2024 kedua indikator dalam tujuan dan sasaran strategis tersebut belum menjadi indikator sehingga hanya terisi untuk tahun 2025. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat

Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023-2025 dapat dilihat lebih detail pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023-2025

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
T1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan										
1.1.3. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas										
1.1.3.1. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	100
T2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien										
2.1.2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat										
2.1.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	76,33	N/A (Belum dijadikan indikator)	88,96	N/A (Belum dijadikan indikator)	116,6	N/A (Belum dijadikan indikator)	116,6	116,6
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran										108,3

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pada kedua tujuan dan sasaran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah mencapai 100 persen atau lebih. Hal ini berarti realisasi kinerja pada seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini disajikan uraian capaian kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

3.1.1 IKU 1.1.3.1. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

Pengukuran indikator "Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas" dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah publikasi/laporan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan seluruh publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang dihasilkan. Seluruh publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data utama.

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran Persentase Publikasi/Laporan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas pada tahun 2025 adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah berhasil menyediakan publikasi yang berkualitas.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persen	100	100	100

Publikasi dapat memperoleh predikat berkualitas jika hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) atas kegiatan statistik yang menghasilkan data sebagai sumber data utama publikasi tersebut memperoleh predikat berkualitas. Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berhasil memperoleh nilai PSB sebesar 4,67 pada domain kualitas data dan 4,33 pada aspek pemanfaatan data statistik. Oleh karena itu kualitas data dan pemanfaatan data Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 dinyatakan berkualitas.

Daftar 15 publikasi telah diterbitkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Statistik Sosial Budaya 2024
2. Statistik Penunjang Pendidikan 2024
3. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2024
4. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2024
5. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2024
6. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025
7. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2025
8. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025
9. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025
10. Statistik Pendidikan 2025
11. Profil Anak Usia Dini 2025
12. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025
13. Statistik Pemuda Indonesia 2025
14. Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2025
15. Profil Statistik Kesehatan 2025

Indikator kinerja sasaran Persentase Publikasi/Laporan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas memiliki target proksi yaitu persentase tahapan penyusunan publikasi yang sudah diselesaikan yang dihitung sebagai perbandingan antara jumlah tahapan penyusunan publikasi yang sudah diselesaikan dengan jumlah tahapan penyusunan publikasi yang direncanakan dan dinyatakan dalam persen. Jumlah tahapan penyusunan publikasi yang direncanakan mencakup rangkaian seluruh kegiatan Susenas sebagai sumber data utama publikasi-publikasi yang disusun oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sampai dengan diselesaikannya publikasi tersebut.

Kegiatan penyusunan publikasi yang menjadi dasar hitung indikator proksi pada indikator kinerja sasaran Persentase Publikasi/Laporan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas mencakup kegiatan persiapan, pengumpulan data,

pengolahan, dan analisis Susenas hingga akhirnya data-data hasil Susenas didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Hal ini karena Susenas merupakan sumber data utama bagi publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sekaligus kegiatan statistik yang diajukan dalam Penilaian Statistik Berkualitas. Pada tahun 2025 kegiatan Susenas mencakup Susenas September 2024, Susenas Maret dan September 2025, serta Susenas Maret 2026. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan publikasi meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, hingga diseminasi publikasi melalui *website* BPS terdapat pada lampiran.

Dalam mencapai kinerja indikator kinerja sasaran persentase publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa tahapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara ideal misalnya pelatihan tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara tatap muka langsung, pengumpulan Rentang Harga (RH) tidak dapat dilaksanakan di seluruh wilayah, dsb;
2. Terdapat Blok Sensus sampel Susenas yang overlap dengan BS sampel Sakernas;
3. Susenas September mulai tahun 2025 dirancang untuk menyediakan indikator-indikator secara kontinyu namun kebutuhan indikator SDGs dan RPJMN dari gabungan 3 modul (MSBP, MKP, dan Hansos) sangat banyak sehingga mengakibatkan pertanyaan dalam kuesioner sangat banyak dan menimbulkan responden burden;
4. Adanya *lag* waktu dari pemutakhiran SUPAS yang hasilnya digunakan sebagai dasar penarikan sampel Susenas September 2026 dengan pelaksanaan lapangan Susenas September 2026 mengakibatkan non respons;
5. Pada persiapan Susenas Maret 2026, terdapat 18 kabupaten kota dari Aceh dan 4 kabupaten/kota Sumatera Utara yang tidak dapat mengikuti pembelajaran

mandiri dan/atau pembelajaran jarak jauh pelatihan instruktur nasional karena terjadi bencana banjir.

Upaya dan solusi yang dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menghadapi kendala dan tantangan di atas yaitu:

1. Melaksanakan pelatihan Susenas dengan kombinasi daring dan luring sesuai ketersediaan anggaran di Kabupaten/Kota dan menggunakan data Rentang Harga tahun sebelumnya;
2. Menggunakan hasil pemutakhiran Sakernas untuk BS yang *overlap* antara sampel Sakernas dan sampel Susenas;
3. Melakukan uji coba kuesioner Susenas September 2025 untuk mengukur waktu wawancara dan memperbaiki kuesioner agar tidak membebani responden saat wawancara;
4. Menyediakan sampel cadangan untuk mengatasi non respons pada Susenas September 2025;

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah anggota Tim Susenas pada tahun 2026
2. Menyelenggarakan kelas pelatihan innas susulan dan mengkoordinasikannya dengan Pusdiklat BPS
3. Menyesuaikan kembali jadwal ARC Publikasi agar tidak tumpang tindih

3.1.2. IKU 2.1.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mengukur keberhasilan pembinaan statistik sektorial yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Capaian kinerja indikator ini diukur Capaian Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

1. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS) dengan bobot 80%. Pada tahun 2025, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperoleh nilai TPSS sebesar 95,79 poin.
2. Normalisasi Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Mitra Direktorat dengan bobot 20%. Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian IPS sehingga dasar hitung untuk tahun 2025 kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra dihitung dari kenaikan nilai IPS 2023-2024 pada K/L yang bukan merupakan K/L baru yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai normalisasi kenaikan rata-rata IPS kedua K/L tersebut adalah sebesar 61,65 persen.

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 untuk IKU tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kedua komponen di atas adalah sebesar 88,96 poin. Capaian indikator kinerja sasaran persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin	76,33	88,96	116,55

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 telah berhasil melampaui target Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap 7 K/L yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Kegiatan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 diawali dengan kegiatan pertemuan bilateral bersama setiap K/L mitra untuk mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga melaksanakan *workshop* Pembinaan Statistik Sektoral yang melibatkan seluruh K/L mitra. Kegiatan pembinaan selanjutnya dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan dengan walidata maupun produsen data di setiap K/L mitra.

Kendala dan tantangan yang dihadapi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mencapai kinerja indikator kinerja sasaran ini yaitu:

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga rencana kerja pembinaan perlu disesuaikan
2. Adanya K/L mitra yang merupakan K/L baru hasil pemekaran masih dalam proses penyesuaian struktur organisasi sehingga belum terbentuk unit kerja yang menangani data atau wali data
3. K/L mitra memiliki tingkat pemahaman statistik sektoral yang beragam
4. Padatnya jadwal dari anggota tim PSS sehingga sulitnya mensinkronkan jadwal antar anggota tim maupun jadwal antar KL

Dalam menghadapi kendala dan tantangan tersebut, upaya dan solusi yang dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan statistik sektoral secara *online*
2. Menunjuk PIC untuk berkoordinasi dengan setiap K/L
3. Menyesuaikan materi pembinaan dengan tingkat pemahaman tim di masing-masing K/L

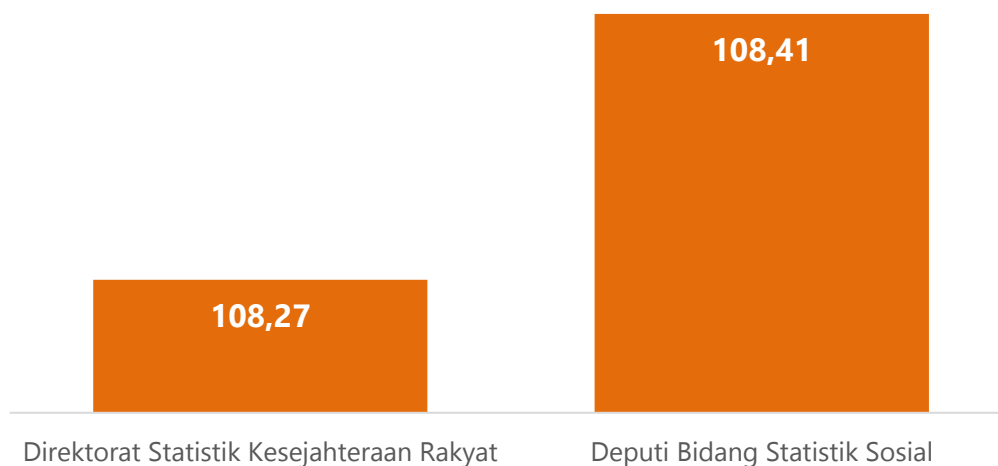
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah menambah jumlah anggota tim sesuai jumlah K/L yang menjadi lokus pembinaan

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dengan Rata-rata Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Berdasarkan gambar di bawah ini, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memiliki capaian kinerja yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial. Meskipun demikian capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang baik yaitu mencapai lebih dari 100 persen. Hal ini berarti Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat diterapkan, yaitu mempertahankan kinerja untuk penyediaan data-data melalui Susenas yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan pembinaan statistik sektoral.

Gambar 4. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2024



3.1.4 Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PKO memiliki dua komponen penilaian yaitu nilai SAKIP dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2025 nilai SAKIP Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar 73,15 dengan predikat Sangat Baik/BB. Berdasarkan nilai SAKIP tersebut penghitungan PKO untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mendapatkan koreksi normalisasi sebesar 10 persen.

Komponen berikutnya adalah capaian kinerja untuk setiap IKU. Capaian kinerja untuk IKU 1 Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas sebesar 100 persen sehingga normalisasi capaian PK untuk IKU 1 sebesar 100 persen. Setelah dikoreksi dengan normalisasi nilai SAKIP sebesar 10 persen maka nilai akhir capaian PK untuk IKU 1 sebesar 90 persen. Sementara itu capaian kinerja untuk IKU 2 yaitu tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar 116,55 sehingga normalisasi capaian PK untuk IKU 2 sebesar 110 persen. Setelah dikoreksi dengan normalisasi nilai SAKIP sebesar 10 persen maka nilai akhir capaian PK untuk IKU 2 sebesar 99 persen.

Berdasarkan nilai SAKIP dan capaian kinerja pada tahun 2025 total capaian PK Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar 189 persen dengan nilai kinerja organisasi rata-rata capaian PK sebesar 94,5. Nilai PKO Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 sebesar 94,5 termasuk ke dalam kategori Baik yang berarti tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

3.2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Terhadap Target Renstra

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memiliki tiga sasaran kegiatan pada Renstra 2025-2029 yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.

Sasaran ini mencerminkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam memperkuat penyusunan kebijakan publik dan pengambilan keputusan berbasis data melalui insight yang berkualitas. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menggunakan **Indikator Kinerja: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.**

2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Kesejahteraan Rakyat

Sasaran kegiatan ini menunjukkan komitmen Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung tersedianya indikator sasaran visi yang berkaitan dengan statistik kesejahteraan rakyat untuk memperkuat kebijakan berbasis data diseluruh tingkatan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini menggunakan **Indikator Kinerja: Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Menjadi Statistik Resmi.**

3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Sasaran kegiatan kegiatan ini menegaskan kedudukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam membina penyelenggaraan statistik di masing-masing Kementrian/Lembaga untuk mendukung kebijakan berbasis data di seluruh tingkatan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini menggunakan **Indikator Kinerja: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.**

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terhadap target Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten dalam

mendukung penyediaan statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025.

Pada Sasaran Kegiatan 1, yaitu Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas mencapai realisasi sebesar 100 persen. Capaian tersebut telah memenuhi target tahun 2025 dan selaras dengan target akhir Renstra tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh publikasi dan laporan statistik yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan serta mendukung kebutuhan data bagi para pemangku kepentingan.

Pada Sasaran Kegiatan 2, yaitu Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat, target Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 100 persen untuk indikator Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Menjadi Statistik Resmi. Pada tahun 2025, indikator ini belum dilakukan pengukuran capaian secara kuantitatif karena masih berada pada tahap penguatan kerangka konseptual, harmonisasi indikator, serta koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait sebagai prasyarat penetapan statistik resmi.

Selanjutnya, pada Sasaran Kegiatan 3, yaitu Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial menunjukkan capaian yang sangat baik. Dengan target tahun 2025 sebesar 76,33 poin, realisasi kinerja mencapai 116,55 poin, atau setara dengan 152,69 persen dari target tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 86,34 poin, capaian tahun 2025 telah mencapai 134,98 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan statistik sektorial serta meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga mitra dalam penyelenggaraan statistik kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional.

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Terhadap Target Renstra**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas							
	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi IE dan 45 IUP Statistik Kesejahteraan Rakyat							
	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Menjadi Statistik Resmi.	Persen	-	100,00	-	-	-
Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat							
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin	76,33	86,34	116,55	152,69	134,98

Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Direktorat Statistik

Kesejahteraan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Beberapa faktor pendorong pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mencapai target yaitu Pertama, penguatan manajemen teknis pengumpulan dan pengolahan data untuk menjaga kualitas publikasi statistik kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan melalui pelatihan petugas, koordinasi intensif dengan tim pengampu kuesioner dan pengolahan data, percepatan finalisasi data mikro, serta monitoring rutin progres penyusunan publikasi. Selain itu, reviu tabulasi dan penyusunan *dummy table* sejak tahap awal turut memastikan konsistensi konsep, definisi, dan kelengkapan analisis sebelum rilis publikasi.

Kedua, optimalisasi metodologi dan penyesuaian teknis operasional untuk merespons berbagai dinamika lapangan. Upaya tersebut meliputi penggunaan data rentang harga tahun sebelumnya akibat keterbatasan cakupan, pemutakhiran blok sensus *overlap* dengan Sakernas menggunakan hasil pemutakhiran terbaru, penggunaan penimbang SP2020LF, serta keputusan tidak melakukan *updating* Susenas dengan memanfaatkan hasil *updating* SUPAS 2025. Selain itu, dilakukan uji coba kuesioner gabungan modul dan identifikasi tabel-tabel prioritas agar publikasi tetap fokus dan berkualitas.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas unit kerja dan kementerian/lembaga. Koordinasi dilakukan dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS), BPS Provinsi, serta PIC indikator di K/L terkait guna memastikan ketepatan jadwal pengiriman raw data, sinkronisasi konsep indikator baru, serta pembahasan teknis penghitungan indikator. Langkah ini mendukung harmonisasi statistik dan meminimalkan potensi perbedaan definisi antar instansi.

Keempat, menggunakan strategi adaptif terhadap keterbatasan anggaran. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan pengajuan relaksasi anggaran, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, efisiensi jumlah petugas dengan

redistribusi beban kerja, serta pelaksanaan kegiatan secara lebih selektif dan prioritas. Pendekatan ini memastikan target kinerja tetap tercapai meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Kelima, penguatan tata kelola pembinaan statistik sektoral. Langkah yang dilakukan antara lain internalisasi pembinaan statistik sektoral kepada seluruh pegawai, pembentukan Tim Pembina Statistik Sektoral melalui SK resmi, serta identifikasi kegiatan statistik sektoral pada K/L lokus pembinaan. Pendekatan ini memperjelas peran dan tanggung jawab pembinaan sehingga pelaksanaan lebih terstruktur.

Keenam, pemanfaatan teknologi informasi melalui pelaksanaan kegiatan secara daring turut mendukung keberlanjutan pembinaan di tengah keterbatasan anggaran. Workshop dan koordinasi pembinaan statistik sektoral dilaksanakan secara online sehingga tetap menjangkau K/L mitra secara efektif dan efisien.

Ketujuh, penguatan koordinasi dan komunikasi intensif dengan PIC pada masing-masing K/L juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pembinaan. Pendekatan ini membantu percepatan penyelarasan proses bisnis statistik sektoral, khususnya pada K/L baru atau hasil pemekaran yang masih dalam tahap penyesuaian struktur organisasi dan penetapan walidata.

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target yaitu:

1. Efisiensi dan relaksasi anggaran yang signifikan sehingga mempengaruhi cakupan kegiatan dan dukungan operasional serta membatasi intensitas dan cakupan pembinaan.
2. *Overlap* blok sensus Susenas dengan Sakernas yang memerlukan penyesuaian teknis pemutakhiran.
3. Jadwal pengiriman *raw data* bertepatan dengan cuti bersama sehingga berpotensi menghambat *timeline* pengolahan.

4. Kompleksitas kuesioner Susenas September 2025 yang merupakan gabungan beberapa modul.
5. Keterlambatan ketersediaan data ketenagakerjaan dari Sakernas yang berdekatan dengan jadwal rilis publikasi.
6. Penambahan indikator baru yang belum memiliki kesepakatan konsep dan definisi antar K/L.
7. Tantangan harmonisasi penyajian data kependudukan antara Susenas dan sumber data demografi lainnya.
8. K/L baru atau hasil pemekaran yang masih dalam proses penataan organisasi sehingga belum memiliki unit kerja data atau walidata yang definitif.
9. Variasi tingkat kesiapan tata kelola statistik sektoral antar K/L mitra binaan.

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.

Capaian Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai Pembina Data Statistik sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam tatanan Sistem Statistik Nasional (SSN), pembinaan statistik merupakan salah satu upaya implementasi aspek Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi (KISS) dalam penyediaan data dan informasi statistik. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi penyelenggara statistik sektoral, meningkatkan kualitas statistik sektoral, dan menghasilkan data sektoral yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat turut mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui perannya sebagai pembina statistik sektoral pada kementerian/lembaga. Pembinaan Statistik Sektoral dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui penguatan tata

kelola, standardisasi konsep dan definisi, serta peningkatan kualitas data yang dihasilkan.

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada tujuh kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data sektoral yang berkualitas, selaras dengan standar statistik nasional, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Output kegiatan pembinaan yang dilaksanakan meliputi internalisasi dan pembinaan statistik sektoral kepada seluruh pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; pelaksanaan workshop Pembinaan Statistik Sektoral kepada seluruh kementerian/lembaga yang menjadi lokus pembinaan; pelaksanaan rapat koordinasi dan identifikasi kegiatan statistik sektoral pada seluruh kementerian/lembaga lokus pembinaan; serta pelaksanaan penilaian mandiri Penyelenggaraan Statistik Berkualitas beserta pengumpulan bukti dukungannya.

Nilai Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Triwulan IV 2025 sebesar 95,79 poin, di atas target yang ditetapkan sebesar 80 poin. Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian IPS sehingga dasar hitung untuk tahun 2025 kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra dihitung dari kenaikan nilai IPS 2023–2024 pada kementerian/lembaga yang bukan merupakan K/L baru yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun, khususnya pada Triwulan I
2. Kementerian/lembaga baru atau hasil pemekaran masih dalam proses penyesuaian struktur organisasi sehingga belum terbentuk unit kerja yang menangani data atau berperan sebagai walidata
3. Tingkat pemahaman terhadap pentingnya pembinaan statistik yang masih bervariasi antar kementerian/Lembaga
4. Kendala dalam penentuan waktu pertemuan dengan kementerian/lembaga meskipun anggaran telah dibuka untuk pertemuan luring
5. Padatnya jadwal anggota tim Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) sehingga menyulitkan sinkronisasi jadwal internal maupun dengan kementerian/Lembaga
6. Jumlah anggota tim PSS yang belum sebanding dengan jumlah kementerian/lembaga lokus pembinaan

Adapun solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga secara daring sebagai respons terhadap efisiensi anggaran
2. Penguatan koordinasi dengan penanggung jawab (PIC) masing-masing kementerian/Lembaga
3. Penyesuaian materi pembinaan sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing kementerian/Lembaga
4. Penyusunan kalender jadwal bersama untuk mengatasi kendala penjadwalan
5. Pembagian tanggung jawab PIC kementerian/lembaga yang disesuaikan dengan beban kerja tim.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pelaksanaan *workshop* Pembinaan Statistik Sektoral secara daring pada awal tahun sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran
2. Penyusunan materi pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kementerian/Lembaga
3. Penyusunan jadwal kunjungan ke setiap kementerian/Lembaga

4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan rencana yang telah disusun
5. Penambahan jumlah anggota tim sesuai dengan jumlah kementerian/lembaga yang menjadi lokus pembinaan.

Capaian Prioritas Presiden

Tahun 2025 merupakan periode awal pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan fokus pada konsolidasi kebijakan serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Prioritas Presiden diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan strategis nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun ketahanan nasional, dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan fondasi pembangunan jangka panjang. Dalam mendukung pencapaian Prioritas Presiden tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan memastikan ketersediaan data statistik yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program prioritas pemerintah. Sejalan dengan peran tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperkuat dukungan BPS melalui kontribusi langsung dalam penyediaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Survei Makan Bergizi Gratis (MBG). DTSEN berfungsi sebagai basis data utama dalam penajaman sasaran program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara Survei MBG menyediakan informasi statistik yang komprehensif untuk memantau pelaksanaan, cakupan, dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menyediakan data seluruh keluarga yang diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi desil 1 sampai dengan desil 10, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penargetan berbagai

program pemerintah, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4 tahun 2025. Pemanfaatan DTSEN telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, antara lain untuk penyaluran bantuan sosial sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial, penyediaan data dan pemanfaatan data statistik untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan perumahan bagi guru, penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik tenaga kesehatan serta penyelenggaraan perumahan bagi tenaga kesehatan, program bantuan perumahan untuk buruh, program bantuan perumahan untuk pekerja migran Indonesia, serta program bantuan perumahan untuk wartawan.

Di dalam tim penyelenggaraan Sekolah Rakyat, BPS merupakan bagian dari Satgas Peserta Didik yang bertugas melakukan pemadanan data calon peserta didik Sekolah Rakyat dengan DTSEN dan memberikan informasi mengenai peringkat kesejahteraan keluarganya. Selain itu, BPS memberikan dukungan kepada Kementerian Sosial dalam pelaksanaan verifikasi lapangan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Hasil verifikasi selanjutnya dipadankan dengan DTSEN dan menghasilkan profil siswa sekolah rakyat. Verifikasi sekolah rakyat telah dilaksanakan di 166 lokasi yang tersebar di 144 kabupaten/kota pada 31 provinsi.

Sampai dengan 16 November 2025, sebanyak 24 K/L telah memanfaatkan DTSEN, baik sebagai pengirim data, penerima data balikan, maupun dalam rangka pemutakhiran data. K/L tersebut antara lain antar lain: Kementerian ESDM (PLN), Pertamina, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, Bank Indonesia, SMF PNM, Kemendagri, KPU, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, BPKP, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Baznas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal. Selain itu, sebanyak 6 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, juga telah memanfaatkan DTSEN.

Dalam menjalankan amanat pembentukan dan pengelolaan DTSEN pada tahun 2025 terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPS yaitu:

1. Data yang dikelola dalam rangka penyusunan DTSEN adalah data *by name by address* yang merupakan data pribadi. Penyebarluasan data pribadi oleh BPS kepada 3 K/L sesuai amanat Inpres 4/2025 perlu didukung oleh aturan hukum sebagai turunan dari Inpres 4/2025.
2. Data individu dan keluarga di dalam DTSEN belum seluruhnya memiliki informasi variabel yang lengkap sebagaimana dibutuhkan untuk pemeringkatan.
3. Proses akuisisi data dari K/L/D memerlukan prosedur standar dalam rangka meningkatkan kualitas pemeringkatan dan keseragaman periode pembaruan data, serta untuk menurunkan risiko keamanan data.
4. Data yang dikirimkan oleh K/L/D memiliki kualitas yang beragam sehingga diperlukan prosedur standar untuk menjamin kualitas data sumber pembaruan DTSEN.

Solusi atas permasalahan-permasalahan yang telah dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Perban DTSEN sebagai aturan turunan dari Inpres No. 4 Tahun 2025
2. Melakukan identifikasi sumber data yang dapat digunakan dalam pemutakhiran DTSEN yang berasal dari data administrasi dari K/L/D.

Dalam rangka meningkatkan kualitas DTSEN yang dihasilkan, BPS telah menetapkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

1. Menyusun tata kelola DTSEN sebagai standar operasional pengelolaan DTSEN di BPS maupun dalam hubungan dengan K/L dan Pemerintah Daerah

2. Mengintegrasikan pengumpulan data untuk pembaruan DTSEN dalam Sensus Ekonomi 2026.
3. Melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral mendorong setiap Pemda memiliki mekanisme pemutakhiran DTSEN secara berkala.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. BPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan data statistik sosial ekonomi dan gizi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta dalam mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kuesioner Susenas Maret dan September 2025, BPS mengumpulkan informasi terkait anggota rumah tangga penerima Program Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran anak sekolah. Selain itu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menjadi bagian dalam kegiatan *Adhoc* Survei Evaluasi dan Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, pada Survei Khusus dan Survei *Baseline*, di bawah komando Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik.

Kendala pada penyusunan pertanyaan MBG di Susenas dan Suvei *Baseline* antara lain:

1. Konten Susenas sudah padat sehingga variabel terkait monitoring Program MBG terbatas
2. Pencatatan imputasi MBG pada kuesioner Konsumsi Pengeluaran tidak tergambar terpisah.
3. Pembahasan pada tahap persiapan kurang matang, pada tahap teknis misalnya pembahasan kuesioner, Pembangunan aplikasi Fasih, sehingga menyebabkan kendala pada proses cleaning

Solusi:

1. Informasi MBG di Susenas Maret memuat 3 pertanyaan. Pada Susenas September 13 pertanyaan.
2. Informasi MBG pada Survei *Baseline* digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan survey lainnya.

Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan yaitu Perlu pembahasan pencatatan imputasi MBG pada kuesioner Konsumsi Pengeluaran agar lebih terukur *share* konsumsi rumah tangga dari MBG.

3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Terkait kinerjanya di tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Piagam penghargaan dengan predikat "Terbaik I" untuk Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 dengan nilai 4,67 pada Domain Kualitas Data dan 4,33 pada Aspek Pemanfaatan Data statistik.



2. Penghargaan/Pengakuan konsumen terkait data atau publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - a. Data mikro Susenas menempati peringkat pertama kategori data mikro yang paling dibutuhkan dan diminati konsumen data di tahun 2025.
 - b. Statistik Pendidikan 2024 menempati peringkat ketiga kategori publikasi yang banyak dicari konsumen data per Desember 2025.
 - c. Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024, Profil Statistik Kesehatan 2023, dan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 menempati peringkat keempat, kelima, dan kesembilan kategori publikasi yang banyak dicari konsumen data per Desember 2025.

Tidak hanya prestasi yang sudah dicapai, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga melakukan inovasi sebagai berikut:

1. *Sharing Session* "Dari Data Jadi Cerita: Inspirasi Infografis yang Memikat! bagi internal pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam penulisan publikasi serta infografis.
2. *Knowledge sharing* pemanfaatan data Susenas kepada pengguna data. Kegiatan ini dikenal dengan "KERABAT" atau Kesra Rabu Bersahabat. KERABAT dilakukan sebagai wujud implementasi dari Sasaran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, baik yang digunakan dalam penyediaan indikator RPJMN maupun indikator global SDGs. Selama tahun 2025, KERABAT dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan tema yang berbeda. Adapun tema di setiap kegiatan adalah sebagai berikut.
 - a. KERABAT I: *Knowledge Sharing* Penghitungan Indikator PoU dan Analisisnya
 - Pelaksanaan: Rabu, 12 Maret 2025
 - Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat

- b. KERABAT II: *Knowledge Sharing* "Seberapa Jauh Buah Jatuh dari Pohonnya? Kombinasi Pendidikan Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Indonesia"
 - Pelaksanaan: Rabu, 11 Juni 2025
 - Narasumber: Freshy Windy Rosmala Dewi SST
- d. KERABAT III: *Knowledge Sharing* Pengenalan *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)
 - Pelaksanaan: Rabu, 25 Juni 2025
 - Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat
- e. KERABAT IV: *Knowledge Sharing* Menghitung Dampak Perlindungan Sosial terhadap Nilai Indikator
 - Pelaksanaan: Rabu, 27 Agustus 2025
 - Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 telah didasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025-2029 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio efisiensi pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Rincian Output Periode 2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas								
Persentase publikasi/laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persen	100	100	100	2.520.420.000	2.209.362.224	87,66	1,14
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lemba ga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat								
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin	76,33	88,96	116,55	42.374.000	24.618.902	58,10	2,01
Total				108,275	2.562.794.000	2.233.981.126	87,17	1,24

Tabel 3.5 memberikan informasi Nilai Pagu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada akhir tahun anggaran 2025, yaitu sebesar Rp2.562.794.000,-. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.233.981.126,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 sebesar 87,17 persen. Salah satu anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2025 adalah Belanja Jasa Profesi dan Belanja Honor Output Kegiatan berupa Honor narasumber sebesar Rp47.100.000,-. Honor narasumber tidak terserap karena kegiatan untuk mengundang narasumber tidak jadi dilakukan karena anggaran kegiatan paket meeting untuk mengundang narasumber ditiadakan.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu:

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}$$

Keterangan:

Jika ≥ 1 artinya efisien

Jika < 1 artinya tidak efisien

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 adalah sebesar 1,24 yang berasal dari rata-rata capaian kinerja sebesar 108,275 persen dengan besaran realisasi anggaran 87,17 persen. Efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 1,24 dimana angka tersebut ≥ 1 yang artinya efisien. Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5. Efisiensi pada indikator sasaran "Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas" sebesar 1,14 yang berasal dari realisasi anggaran 87,66 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Berikutnya, efisiensi untuk indikator sasaran "Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat" mencapai 2,01, yaitu dengan realisasi anggaran sebesar 58,10 persen mampu mewujudkan rata-rata capaian kinerja sasaran sampai dengan 116,55 persen.

Berbagai upaya efisiensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat dengan K/L lokus pembinaan statistik sektoral secara daring
2. Menambah peserta pelatihan inas Susenas dengan peserta cadangan dari BPS Provinsi sehingga pengiriman inas pusat untuk pelatihan petugas Susenas di kabupaten/kota dapat dikurangi

3. Menghimbau pelaksana perjalanan dinas untuk memanfaatkan harga tiket NKRI dari maskapai Garuda Indonesia atau memilih alternatif maskapai lain untuk efisiensi perjalanan dinas
4. Melaksanaan perjalanan dinas supervisi Susenas secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yaitu menjaga kualitas data Susenas.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 secara rata-rata meningkat dari tahun 2024, yakni sebesar 108,3 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87,17 persen. Dari dua indikator kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan Deputi Bidang Statistik Sosial, seluruh indikator kinerja mampu memenuhi target yaitu sebesar 100 persen dimana satu di antaranya mampu mencapai lebih dari 100 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A.

Capaian kinerja "Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data" dengan target 100 persen pada tahun 2025 mampu direalisasikan sebesar 100 persen oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Untuk target capaian "Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat" adalah 76,33 persen dengan realisasi sebesar 116,55 persen.

Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 20.416.995.000,-. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) rincian output yaitu pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Publikasi/Laporan Susenas. Sebagai tindak lanjut langkah-langkah penghematan anggaran TA 2025 sesuai arahan Kementerian Keuangan pagu penyesuaian Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menjadi sebesar Rp 2.562.794.000,- dan direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.233.981.126,- atau sebesar 87,17 persen. Dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100 persen dan realisasi anggaran sebesar 87,17

persen, maka efisiensi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 mencapai 87,43 persen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2025 direpresentasikan dalam bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Berbagai upaya perbaikan baik teknis maupun nonteknis terus dilakukan guna menyempurnakan tingkat keberhasilan capaian kinerja untuk mewujudkan Renstra tahun 2025–2029. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan ulasan capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian kinerja baik. Namun demikian Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tidak berpuas diri dan terus meningkatkan capaian masing-masing indikator kinerja secara maksimal sesuai dengan target. Dibutuhkan dukungan seluruh fungsi untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih optimal dengan efisiensi yang lebih baik.

Secara umum, berbagai tantangan yang dihadapi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah disampaikan secara detail pada bagian potensi dan permasalahan. Berbagai tantangan yang telah dapat diidentifikasi sebelumnya memerlukan berbagai tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan terhadap penggunaan data Susenas dengan berbagai ragam data Susenas ditindaklanjuti dengan mewujudkan beragam publikasi dan analisis data sesuai kebutuhan pengguna data. Ragam publikasi yang tercantum sesuai target maupun beragam publikasi dan analisis tambahan yang disosialisasikan pada berbagai pihak kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat luas sehingga memberikan manfaat dan dampak pengambilan kebijakan berbasis data yang semakin baik.

2. Seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Susenas semakin optimal memenuhi standar operasional yang ditetapkan, dengan demikian diharapkan berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.
3. Untuk menunjang pelaksanaan lapangan Susenas yang semakin optimal, perlu untuk kembali mengadakan pelatihan petugas secara luring/*offline*, dan menambah jam pelajaran pelatihan. Dengan semakin banyaknya kegiatan yang tumpang tindih di BPS, para petugas yang sudah biasa mengikuti kegiatan Susenas sudah mengikuti kegiatan lain dan tidak bisa lagi mengikuti kegiatan Susenas, sehingga banyak petugas baru yang pemahamannya terhadap materi Susenas masih kurang namun diikutsertakan di kegiatan Susenas.
4. Peningkatan anggaran sebagai upaya pemberian tanda terimakasih kepada responden Susenas perlu terus diupayakan untuk meningkatkan partisipasi responden dalam Susenas.
5. Strategi guna meningkatkan daya tarik petugas lapangan yang berkualitas di tengah tumpang tindihnya kegiatan lapangan di kabupaten/kota antara lain dilakukan dengan upaya peningkatan biaya pendataan rumah tangga yang lebih baik terutama sesuai beban tugas Susenas yang semakin menantang.
6. Dibutuhkan koordinasi antar tim dan direktorat terkait kegiatan BPS yang sering tumpang tindih, agar bisa menyesuaikan *timeline* antar kegiatan yang efektif dan efisien
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengomunikasikan berbagai temuan di bidang pengolahan yang telah berlaku sebelumnya terus diupayakan sehingga program entri yang dibangun telah memiliki kualitas lebih baik dan minim perbaikan program entri data.
8. Pengembangan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terus diupayakan terutama dengan menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas secara periodik dan berkesinambungan seperti diklat, seminar, *workshop* dan kegiatan peningkatan kemampuan teknis lainnya. Selain

itu, kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 sehingga peningkatan kualitas SDM semakin baik.

9. Penyusunan matriks beban kerja antarpersonil serta pemanfaatan kolaborasi perlu dilakukan sehingga beban kerja tiap-tiap SDM dapat terpetakan secara jelas. Dalam kasus adanya yang bersifat *ad hoc*, pekerjaan dapat diberikan kepada staf yang memiliki beban kerja lebih ringan dan sesuai dengan kapasitasnya.
10. Peningkatan inovasi dalam proses bisnis kegiatan statistik di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat seperti proses *workshop* intama, pelatihan innas, dan pelatihan petugas Susenas.
11. Perlu memberikan pemahaman yang selaras kepada kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Terutama pemahaman mengenai keahlian statistik agar kementerian/lembaga dapat menghitung indikator kinerjanya masing-masing.
12. Dibutuhkan penyederhanaan format publikasi di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara efisien.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Avenzora, SE, MSE
Jabatan : Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama

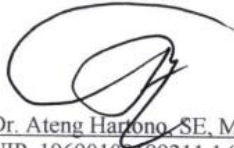
Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama



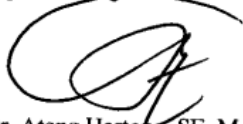
Ahmad Avenzora, SE, MSE
NIP. 19690313199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	100 persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	2,26 poin

Kegiatan	Anggaran
2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.713.679.000
JUMLAH	Rp. 3.713.679.000

Deputi Bidang Statistik Sosial



Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat



Ahmad Avenzora, SE, MSE
NIP. 19690313199101 1 001

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2025

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1	S-3	3
2	S-2	27
3	S-1/D-IV	26
4	D-III	1
5	SMA	1
Total		58

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Golongan dan Kepangkatan Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1	III/a	6
2	III/b	9
3	III/c	9
4	III/d	16
5	IV/a	10
6	IV/b	3
7	IV/c	3
8	IV/d	2
Total		58

No.	Pangkat	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1	Pembina	10
2	Pembina Tk. I	3
3	Pembina Utama Madya	2
4	Pembina Utama Muda	3
5	Penata	9
6	Penata Muda	6
7	Penata Muda Tk. I	9
8	Penata Tk. I	1
9	Penata Tk. I	15
Total		58

Lampiran 4. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1	Direktur	1
2	Statistisi Ahli Utama	1
3	Statistisi Ahli Madya	14
4	Statistisi Ahli Muda	25
5	Statistisi Ahli Pertama	13
6	Arsiparis Ahli Pertama	2
7	Arsiparis Mahir	1
8	Staf	1
Total		58

Lampiran 5. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025

Kementerian Lokus Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
7. Kementarian Kebudayaan

Lampiran 6. Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

1. Penghargaan dari Kepala BPS sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang memperoleh predikat Berkualitas pada Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025.



2. Penghargaan dari Kepala BPS sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 Terbaik Pertama.



Lampiran 7. Daftar Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025


1. Memanfaatkan Google Calendar sebagai sarana mengomunikasikan dan menginformasikan jadwal-jadwal kegiatan masing-masing tim di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.



2. Menginventaris pelatihan yang dibutuhkan pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan pekerjaan.

Aspirasi Direktorat Statistik Kesra

forms/d/e/1FAIpQLSehzM1Dm-MhQ6qTisUE4ObkQc2eya86eVKPb5Ks2_qqWkOb5w/viewform?pli=1



Aspirasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

Menjaring aspirasi kegiatan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Kerabat Kesra

susenas.bps2@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Apa saja kendala yang Anda temui pada saat menyelesaikan pekerjaan? *

Ccontoh: Cara mengelola pencatatan pekerjaan harian dan bukti dukung agar pelaporan KipApp tepat waktu

Your answer

Apa pelatihan yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan? *

Ccontoh: Pelatihan pengelolaan pencatatan pekerjaan harian beserta bukti dukung

Your answer

Tindak Lanjut Aspirasi Kesra

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

Menu 100% Hanya lihat

	A	B	C	D	E
1					
2		Pelatihan yang Dibutuhkan	Tindak lanjut	PIC	Coach Me
3		Pelatihan Adobe Illustrator dan InDesign dari diseminasi untuk pembuatan infografis dan publikasi.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Publikasi
4		Pelatihan pengolahan data (SPSS, Stata, R).	Koordinasi dengan Ketua Tim		Pengolahan
5		Pelatihan public speaking dan soft skills.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Softskill
6		Pelatihan eksplorasi fitur Microsoft Excel.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Pengolahan
7		Pelatihan eksplorasi fitur Microsoft Word.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Publikasi
8		Pelatihan pengelolaan dokumen dan folder di komputer.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Softskill
9		Pelatihan bahasa untuk persuratan.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Administrasi
10		Pelatihan penyusunan RAB dan KAK.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Administrasi
11		Pelatihan membangun inisiatif kerja tanpa risiko tinggi.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Softskill
12		Pelatihan manajemen waktu dan pencatatan kerja.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Softskill
13		Pelatihan tata cara peng-SPJ dan pengurusan dokumen.	Koordinasi dengan Ketua Tim		Administrasi

3. Menyelenggarakan *Sharing Session* "Dari Data Jadi Cerita: Inspirasi Infografis yang Memikat!", untuk memenuhi salah satu aspirasi kebutuhan pelatihan yang disampaikan pegawai.



In-House Training untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik

INSPIRASI INFOGRAFIS YANG MEMIKAT



Fajri Ma'rifatullah
Presentation Coach and Data Storyteller




Kamis, 16 Oktober
08.30 – 12.00 WIB


Gedung 5 Lantai 2
Kantor BPS, Jakarta



INFOGRAFIS?

Adalah sebuah tampilan visual yang menyajikan informasi penting dan menarik, serta mudah dipahami insight nya

- Menyimpan surat-surat dinas pada Google Drive yang diintegrasikan dengan Google Spreadsheet Nomor Surat Dinas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sehingga arsip surat-surat dinas tersusun dengan lebih baik.

The screenshot shows a Google Drive folder named "1. SURAT DINAS" containing 15 PDF files. The files are listed in a table with columns for Name, Owner, Date Modified, File Size, and Sort. The files include various administrative reports, data requests, and meeting minutes from the Directorate of Statistics for Social Welfare, 2025.

Nama	Pemilik	Tanggal diubah	Ukuran file	Urutkan
B-001_VS.190_Surat_Permohonan Narasumber Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025.pdf	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	656 KB	
B-002_VS.190_Surat_Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025.pdf	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	631 KB	
B-3_VS.530_Surat_Pemintaan Penimbang untuk Data Seruti Triwulan IV 2024.pdf	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	261 KB	
B-5_VS.190_Surat_Penyampaian Arahan Deputi Bidang Statistik Sosial Pada Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025.pdf	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	679 KB	
B-6_KU.100_Surat_Pemohonan Pembayaran Kegiatan Kerja Sama PNBPDF	eviyugiana@gmail.com	13 Jun 2025	381 KB	
B-7_VS.190_Surat_Tanggapan atas permohonan Rakorda SNLIK 2025 secara Hybrid.PDF	midori.mayangsari@gmail...	13 Jun 2025	376 KB	
B-8_KP.540_Surat_Formulir Usul Kenaikan Pangkat - Ahmad Budi Prastyo Samudro.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	789 KB	
B-9_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	355 KB	
B-10_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	1,5 MB	
B-11_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	367 KB	
B-12_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	4,6 MB	
B-13_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025.PDF	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	1,5 MB	
B-14_KS.200_Surat_Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025 Sesditjen Bimas Islam Kemenag...	hesekretariatkesra	13 Jun 2025	4,8 MB	
B-15_VS.100_Surat_Pencatatan Program Makan Bergizi Gratis dan Revisi Jadwal Pengiriman Raw Data Susenas ...	midori.mayangsari@gmail...	13 Jun 2025	1 MB	

The screenshot shows a Google Spreadsheet titled "[LAMA 2025] NOMOR PERSURATAN DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2025". The spreadsheet contains a table with columns for Tanggal, Nomor Surat, Kepada, Perihal, and Yang Bertandatangan. The data lists various administrative documents from January 2025, including requests for meeting materials, data requests, and official correspondence.

TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	PERIHAL	YANG BERTANDATANGAN
2 Januari 2025	B-1/04200/Vs.190/2025	Kepala Biro Perencanaan	Permohonan Narasumber Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025	Pak Aven
2 Januari 2025	B-2/04200/Vs.190/2025	Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia	Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025	Pak Aven
2 Januari 2025	B-3/04200/Vs.530/2025	PMSS	Pemintaan penimbang Seruti Triwulan IV 2024	Pak Aven
3 Januari 2025	B-4/04200/KU.100/2025	Kepala Departemen Literasi, Inklusi	Permohonan pembayaran kegiatan Kerja sama PNB	Pak Ateng
3 Januari 2025	B-5/04200/Vs.190/2025	Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia	Penyampaian Arahan Deputi Bidang Statistik Sosial Pada Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025	Pak Aven
6 Januari 2025	B-6/04200/KU.100/2025	Yth. Bapak Bambang S. Antarikswan	Permohonan pembayaran kegiatan Kerja sama PNB	Pak Aven
6 Januari 2025	B-7/04200/Vs.190/2025	Kepala BPS Provinsi NTT dan Kepala BPS	Tanggapan atas permohonan Rakorda secara hybrid	Pak Aven
6 Januari 2025	B-7.a/04200/KP.540/2025	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	Tanggapan atas Permohonan Penambahan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-8/04200/KP.540/2025	Kepala Pusat Data dan Teknologi	Formulir Kenaikan Pangkat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat a.n Ahmad Budi Prastyo Samudro	Pak Aven
7 Januari 2025	B-9/04200/KS.200/2025	Sekretaris Direktorat Jenderal	Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-10/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam	Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-11/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji	Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-12/04200/KS.200/2025	Direktur Pembinaan Administrasi	Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-13/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat	Pemintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-14/04200/KS.200/2025	Kepala BPS Selindo	Pencatatan Program Makan Bergizi Gratis dan Revisi Jadwal Pengiriman Raw Data Susenas Maret 2025	Pak Ateng
7 Januari 2025	B-15/04200/KP.540/2025	Biro perencanaan, Biro Keuangan, Plt.	Formulir Kenaikan Pangkat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat a.n Sumardiyanto	Pak Aven
7 Januari 2025	B-17/04200/ES/2025	OJK	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2024	Pak Aven
7 Januari 2025	B-18/04200/ES/2025	OJK	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2024 kepada OJK	Pak Aven
7 Januari 2025	B-19/04200/ES/2025	Kepala BPS Provinsi Selindo	Monitoring Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Persiapan, dan Rapat Evaluasi SNLIK 2025	Pak Aven
8 Januari 2025	B-20/04200/ES/2025	Irwil 1 dan Irwil 2	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2025	Pak Aven
8 Januari 2025	B-21/04200/Vs.500/2025	Direktur Diseminasi	Pemintaan Data Peta Wilkerstat Level Kecamatan dan Desa	Pak Aven

5. Memanfaatkan SINERGI, *output* Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS2025) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, untuk mempermudah Tim Pengolahan dalam mengorganisasi serial data untuk beberapa indikator umum dan kumpulan *syntax* indikator umum tersebut.



- Menyimpan surat-surat dinas pada *Google Drive* yang diintegrasikan dengan *Google Spreadsheet* Nomor Surat Dinas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sehingga arsip surat-surat dinas tersusun dengan lebih baik.

Dibagikan kepada saya > 1. ARSIP 2025 > 1. PERSURATAN 2025 > 2. PERSURATAN MASUK

Jenis Orang Dimodifikasi Sumber

Nama	Pemilik	Tanggal diubah	Ukuran file	Urutkan
B-1_03100_PR.220 Surat Pemberitahuan Daftar Tim PMSS 2025.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	2,8 MB	
B-2_18000_VS.600 Surat Permohonan Narasumber Sharing Knowledge PoU Lampung.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	388 KB	
B-003_53522_VS.100 Permohonan Rakorda secara Hybrid SNLIK NTT signed.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	83 KB	
B-4_81000_VS.100 Permohonan Mengikuti Rapat Koordinasi Daerah SNLIK secara Hybrid Maluku.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	314 KB	
B-7_03100_VS.530 Pengiriman Penimbang Seruti TW IV 2024.pdf	keseekretariatkesra	22 Jan 2025	215 KB	
B-8_07300_PR.200 Surat Permintaan Narasumber GAINS Cerdas Edisi 1 dan 2 (Signed).pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	66 KB	
B-9_07300_PR.200 Implementasi QG 2025 dan SIGAF 2024 (Signed).pdf	keseekretariatkesra	22 Jan 2025	102 KB	
B-17_02100 PR.110 2025 Usulan Nama Pokja SNLIK 2025 Biroren.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	240 KB	
B-19_03100-ES Surat Tanggapan Terkait Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2025 BPS PMSS.pdf	keseekretariatkesra	20 Jan 2025	69 KB	

[LAMA 2025] NOMOR PERSURATAN DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2025

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

100% Calibri 11

A3:D3 Note: Nomor Surat Dinas diperuntukan untuk persuratan internal dan eksternal BPS atau K/L.

TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	PERIHAL	YANG BERTANDATANGAN
2 Januari 2025	B-1/04200/VS.190/2025	Kepala Biro Perencanaan	Permohonan Narasumber Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025	Pak Aven
2 Januari 2025	B-2/04200/VS.190/2025	Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia	Rapat Persiapan Administrasi SNLIK 2025	Pak Aven
2 Januari 2025	B-3/04200/VS.530/2025	PMSS	Permintaan penimbang Seruti Triwulan IV 2024	Pak Aven
3 Januari 2025	B-4/04200/KJ.100/2025	Kepala Departemen Literasi, Inklusi	Permohonan pembayaran kegiatan Kerja sama PNBP	Pak Ateng
3 Januari 2025	B-5/04200/VS.190/2025	Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia	Penyampaian Arahan Deputi Bidang Statistik Sosial Pada Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025	Pak Aven
6 Januari 2025	B-6/04200/KJ.100/2025	Yth. Bapak Bambang S. Antarikawan	Permohonan pembayaran kegiatan Kerja sama PNBP	Pak Aven
6 Januari 2025	B-7/04200/VS.190/2025	Kepala BPS Provinsi NTT dan Kepala BPS	Tanggapan atas permohonan Rakorda secara hybrid	Pak Aven
6 Januari 2025	B-7.a/04200/VS.190/2025	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	Tanggapan atas Permohonan Penambahan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-8/04200/KP.540/2025		Formulir Kenaikan Pangkat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat a.n Ahmad Budi Prastyo Samudro	Pak Aven
7 Januari 2025	B-9/04200/KS.200/2025	Kepala Pusat Data dan Teknologi	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-10/04200/KS.200/2025	Sekretaris Direktorat Jenderal	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-11/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-12/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-13/04200/KS.200/2025	Direktur Pembinaan Administrasi	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-14/04200/KS.200/2025	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat	Permintaan Data untuk Publikasi Statistik Indonesia 2025	Pak Aven
7 Januari 2025	B-15/04200/VS.100/2025	Kepala BPS Selindo	Pencatatan Program Makan Bergizi Gratis dan Revisi Jadwal Pengiriman Raw Data Susenas Maret 2025	Pak Ateng
7 Januari 2025	B-16/04200/KP.540/2025		Formulir Kenaikan Pangkat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat a.n Sumardiyanto	Pak Aven
7 Januari 2025	B-17/04200/ES/2025	Biro perencanaan, Biro Keuangan, Plt.	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2024	Pak Aven
7 Januari 2025	B-18/04200/ES/2025	OIK	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2024 kepada OIK	Pak Aven
7 Januari 2025	B-19/04200/ES/2025	Kepala BPS Provinsi Selindo	Monitoring Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Persiapan, dan Rapat Evaluasi SNLIK 2025	Pak Aven
8 Januari 2025	B-20/04200/ES/2025	Irwul 1 dan Irwul 2	Permohonan Nama Tim Pokja SNLIK 2025	Pak Aven
8 Januari 2025	B-21/04200/VS.500/2025	Direktur Diseminasi	Permintaan Data Peta Wilkerstat Level Kecamatan dan Desa	Pak Aven

+ ERNAL 2026_Surat Tugas 2025_Surat Tugas 2025_Nota Dinas 2025_Memo 2025_Angka Kredit 2025_BA KODE

Lampiran 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat TA 2025

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BDB.100 Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat	42,374,000	24,618,902	17,755,098	58,10
BMA.003 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	593,493,000	565,915,111	27,577,889	95,35
BMA.006 Publikasi/Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional	1,926,927,000	1,643,447,113	283,479,887	85,29
Total	2,562,794,000	2,233,981,126	328,812,874	87,17

Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan					
1.1.3 Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas					
1.1.3.1 Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persen	TW I	0,0	0,0	0,0
		TW II	33,33	0,0	0,0
		TW III	33,33	33,33	100,0
		TW IV	100,0	100,0	100,0
T2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien					
2.1.2 Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat					
2.1.2.1 Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Poin	TW I	27,69	39,42	120,0
		TW II	56,84	84,39	120,0
		TW III	69,69	84,79	120,0
		TW IV	76,33	88,96	116,55



**SENSUS
EKONOMI
2026**



BerAKHLAK

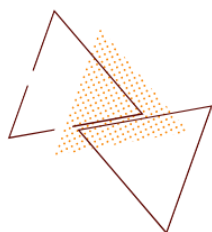
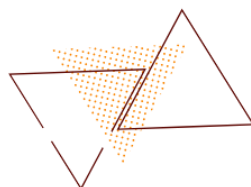
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



bangga

melayani

bangsa



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telepon : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id